



# Gubernur Basuki Tunjuk Jakarta Propertindo Bangun Kereta Ringan

**JAKARTA** — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama batal membentuk badan layanan umum daerah untuk pembangunan proyek kereta ringan (*light rail transit*/LRT). Pemerintah, kata Basuki, akan menunjuk langsung badan usaha milik daerah, PT Jakarta Propertindo, untuk membangun infrastruktur kereta ringan. "BUMD sekaligus membantu Pemprov dalam mengawasi pembangunan LRT oleh kontraktor yang menang lelang," ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota kemarin.

Sebelumnya, Basuki

menunjuk Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Bernhard Hutajulu sebagai kepala badan layanan umum daerah proyek kereta ringan. Namun hingga kini tak ada perkembangan berarti dari badan tersebut. "Kami juga enggak *ngerti*, badan layanan umum daerah tak kunjung selesai menyiapkan rancangan proyek tersebut," ucapnya pekan lalu.

Menurut Basuki, penunjukan langsung tak melanggar aturan. Dia berdalih hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, dengan penunjukan langsung, proyek tersebut bisa segera dikerjakan. "Saya ingin, pada akhir tahun, proyek pembangunan LRT sudah berjalan," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan mekanisme penunjukan langsung merupakan hak gubernur. Dengan adanya mekanisme itu, kata dia, pemerintah DKI tak akan ragu memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada

PT Jakarta Propertindo (Jakpro). "Kami bisa menyuntikkan PMP kepada Jakpro hingga Rp 3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan," tuturnya.

Keinginan Basuki tampaknya tak seirama dengan pendapat Deputy Gubernur Bidang Transportasi Sutanto Suhodo. Menurut dia, siapa pun yang mengerjakan proyek tersebut harus melalui mekanisme lelang. "Kami harus memperhatikan sisi legalitas hingga penganggaran," ujar Sutanto.

Dia juga mengingatkan

Basuki untuk selalu berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembangunan proyek ini. Sebab, anggota Dewan masih belum sreg dengan proyek ini. Menurut anggota Komisi D, Prabowo Sunirman, pembangunan LRT melanggar beberapa aturan. Salah satunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. "Jangan langsung menjalankan proyek tanpa melihat payung hukumnya," kata Prabowo.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Ellen

Tangkudung, meminta DKI membuat kajian yang matang terkait dengan proyek kereta ringan. "Studi kelayakannya harus jelas," ujarnya. Studi itu setidaknya perlu menjawab mengenai apa yang akan dibangun, untuk apa dibangun, akan seperti apa dibangun, dan apa manfaatnya bagi masyarakat.

Yang juga tak boleh dilupakan adalah analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas. "Jadi, jangan serba mendadak, harus ada kajiannya," katanya.

● YOLANDA RYAN ARMINDYA | GANGSAR  
PARIKESIT | NINIS CHAIRUNNISA